

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi artinya rakyat merupakan unsur terpenting dalam menentukan suatu keputusan mengenai apa pun yang berkaitan dengan negara. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari *demoskratos* yang artinya kekuasaan atau penguasaan berada di tangan rakyat. Prinsip dasar demokrasi adalah adanya kendali masyarakat terhadap keputusan kolektif, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengendalikan proses tersebut.

Prinsip demokrasi mengandung arti dijunjung tingginya hak setiap orang untuk berpendapat, untuk memiliki ideologi tertentu, dan untuk memiliki identitas tertentu (Latuconsina, 2013). Demokrasi mencerminkan keinginan keseluruhan rakyat dan merupakan tolak ukur sejauh mana prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politik dapat direalisasikan. Demokrasi menghargai setiap pendapat yang keluar dari pikiran setiap orang. Pendapat atau partisipasi masyarakat menjadi hal krusial yang tentu saja perlu diperhatikan demi keberlangsungan negara yang memberlakukan sistem demokrasi karena tanpa adanya partisipasi masyarakat tentu saja sistem demokrasi itu sendiri tidak akan dapat terbentuk mengingat bahwasanya dalam sistem demokrasi posisi rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi.

Demokrasi dianggap sebagai suatu sistem yang mengutamakan

partisipasi rakyat dan representasi yang mencerminkan kehendak kolektif masyarakat. Mengupayakan partisipasi masyarakat dalam keberlangsungan sistem pemerintahan di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan menyelenggarakan pemilihan umum. Suatu negara dapat dianggap demokratis ketika pemerintahannya terbentuk berdasarkan kehendak rakyat, yang tercermin dalam pemilihan umum yang bersaing untuk memilih perwakilan elit (Schumpeter, 2003). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu memang bukan merupakan satu-satunya bentuk dari terselenggaranya demokrasi tetapi dengan adanya keberadaan pemilu dalam suatu negara menandakan bahwa negara tersebut telah mengimplementasikan demokrasi dalam sistem politik negara tersebut.

Pemilu di Indonesia sendiri mulai dilaksanakan sejak tahun 1955 yang mana merupakan pemilu legislatif yang tujuannya untuk memilih anggota DPR dan anggota Konstituante bahkan tidak hanya berhenti disitu tetapi pemilu terus berlanjut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 hingga yang terakhir pada tahun 2024. Terselenggaranya pemilu merupakan bukti bahwa demokratisasi telah berlangsung dan terus berlanjut

hingga saat ini dan terus diupayakan untuk terlaksana.

Dengan adanya pemilu, rakyat dapat turun langsung berpartisipasi melalui dukungannya kepada calon pemimpin yang sebelumnya telah menyatakan apa saja program kerja mereka kedepannya apabila terpilih untuk menjabat. Hal ini secara tidak langsung akan menyeleksi calon pemimpin mana yang dianggap paling berkualitas dan akan merealisasikan apa yang telah dijanjikan saat masa kampanye kepada masyarakat begitu pun saat menggunakan hak dan kesempatan dalam proses pemilu menjadikan masyarakat akan terlibat dalam proses pemilihan politik dan mengetahui bagaimana kualitas pemimpin yang akan menjabat nantinya.

Mengenai penggunaan hak suara, masyarakat yang memiliki hak untuk menjadi bagian dari pemilih dalam pemilihan umum adalah masyarakat yang sudah mencukupi persyaratan sebagai pemilih dan mereka memiliki hak yang sama mengingat bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi harus dapat merealisasikan kesetaraan politik yang kondisinya adalah seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial dapat memberikan suaranya terhadap pemimpin yang dituju saat pemilu berlangsung. Syarat untuk menjadi menjadi pemilih dalam pemilihan umum sudah tertuang dalam Pasal 4 PKPU No. 7 Tahun 2022 yaitu:

1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibuktikan dengan KTP-el (e-KTP).
4. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el (e-KTP), Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor.
5. Bagi Pemilih belum mempunyai KTP-el (e-KTP) dapat menggunakan Kartu Keluarga (KK).
6. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dengan adanya ketentuan tersebut maka tentu saja dipastikan masyarakat yang menjadi pemilih dalam pemilihan umum merupakan masyarakat yang dianggap siap untuk menentukan siapakah yang pantas menjadi pemimpin sesuai dengan durasi masa jabatan.

Masyarakat yang merupakan elemen dari suatu negara sendiri juga terdiri dari berbagai kelompok-kelompok yang menyesuaikan dengan kepentingan mereka masing-masing. Salah satu kelompok masyarakat yang mencuri perhatian adalah kelompok penggemar musik Korea yang dikenal sebagai *K-Popers*. *Korean Music* atau *K-Pop* sendiri, biasanya terdiri dari *boyband/girlband* maupun solois. Konsep yang mereka tampilkan pun berbeda dengan konsep yang ditawarkan di Indonesia, ataupun industri hiburan di Negara lain. Korea Selatan mengemas industri hiburannya dengan sangat serius, dimana *Management* memegang peranan yang sangat besar (Anwar, 2018). Besarnya pengaruh industri musik yang ada menjadikan genre musik *K-Pop* memiliki penggemar yang besar di berbagai negara dan salah satunya

adalah Indonesia.

Gambar 1. 1 Negara Dengan Jumlah Fans *K-Pop* Terbanyak



Sumber: Goodstats.id

Menduduki posisi nomor 1 menjadi bukti bahwa negara Indonesia memiliki jumlah Fans *K-Pop* terbanyak diantara negara lainnya. Dengan jumlah *K-Popers* yang banyak ini maka umumnya mereka memanfaatkan platform media sosial untuk menyalurkan informasi yang berkaitan dengan *K-Pop* secara cepat dan mampu menjangkau secara luas. Salah satu platform media sosial yang digunakan oleh *K-Popers* adalah Twitter atau kini berubah nama menjadi X yang menjadi platform media sosial yang umumnya mereka gunakan. Penggemar *K-Pop* saat ini paling banyak dijumpai di media sosial X. Karena segala informasi yang berasal dari twitter dianggap lebih cepat menyebar, serta cara penggunaanya yang sangat mudah dan sederhana (Latifa & Harianto, 2023). Aktivitas *K-Popers* yang tinggi di Twitter dibuktikan

dengan adanya 7,5 miliar tweet yang membicarakan soal *K-Pop* pada rentang 1 Juli 2020 – 30 Juni 2021 dimana bersamaan dengan ini diketahui juga bahwa Indonesia merupakan negara yang menjabat sebagai negara nomor 1 dengan volume tweet terbanyak.

Gambar 1. 2 #KpopTwitter 2020-2021 20 Negara Dengan Volume Tweet Terbanyak



Sumber: X

Keberadaan *K-Popers* di Indonesia menjadi hal yang menarik karena jumlahnya dan persebaran mereka diseluruh bagian Indonesia. Jumlah yang tidak sedikit ini menimbulkan kepercayaan bahwa *K-Popers* merupakan salah satu kelompok masyarakat yang juga penting untuk dirangkul menjelang masa pemilu. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2008-2012 Wahidah Suaib mengatakan, seiring berkembangnya zaman, partisipasi pemilu tidak hanya terbatas oleh kelompok pemantau atau aktivis kampus saja. Namun, partisipasi masyarakat yang lebih luas, termasuk *K-Popers*. Dalam beberapa kesempatan ditemukan bahwa aktivitas *K-Popers* dan fenomena

politik kerap kali terjadi yang berarti bahwa *K-Popers* merupakan kelompok masyarakat yang melek akan politik.

Keterlibatan *K-Popers* dalam perkara politik dibuktikan dalam beberapa kesempatan. Dalam kata-kata Meliana & Dejehave (2023) secara khusus, para penggemar dunia hiburan Korea Selatan yang kerap disebut fandom atau fans *K-Pop* menggunakan media sosial Twitter untuk menyampaikan harapannya atas penolakan omnibus law atau RUU Cipta Kerja. Tagar bertajuk #MosiTidakPercaya, DPR pengkhianat, demo DPR *We Gang Gang* dan lainnya sangat ngetren di tahun 2020. Penelitian ini membuktikan bahwa *K-Popers* terlibat dalam partisipasi politik bahkan bukan hanya sebagai pengikut tetapi juga penggerak. *K-Popers* menunjukkan keterlibatan aktif mereka di media sosial dengan memanfaatkan platform tersebut untuk menyoroti isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan di Indonesia. Partisipasi mereka dalam mengkritisi pengesahan UU Cipta Kerja menjadi bukti bahwa kelompok ini mulai memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial dan politik di dalam negeri. Tidak berhenti pada isu nasional tetapi keterlibatan *K-Popers* juga ditemukan saat merespon kampanye Trump di tahun 2020 beserta adanya gerakan black lives matter yang dibahas dalam Sidik & Rizky (2021) dimana dalam melaksanakan aktivisme internet, *K-Popers* secara global turut aktif melakukan gerakan sosial secara daring di Twitter dan menanggapi berbagai isu-isu internasional bahkan, dorongan gerakan sosial daring yang dilakukan oleh *K-Popers* ini mampu mempengaruhi realitas sosial yang terjadi di dunia nyata.

Almaida, Gumelar & Laksmiwati (2021: 18) menyebutkan bahwa menurut hasil survey IDN Times (2019), 40,7 % penggemar *K-Pop* di Indonesia berasal dari kalangan berumur 20-25 tahun, 38,1 % berusia 15-20 tahun, 11,9 % berusia lebih dari 25 tahun dan persentase paling sedikit berasal dari usia 10-15 tahun yakni sebanyak 9,3 %. Dengan adanya fakta ini menandakan *K-Popers* didominasi oleh masyarakat yang cukup umur untuk menjadi pemilih dalam pemilu selanjutnya sehingga suara pemilu yang berasal dari *K-Popers* ini cukup besar yang mana hal ini menjadi suatu kesempatan bagi partai politik, tentu saja merupakan suatu keberhasilan bagi partai politik apabila mampu mendapatkan suara kelompok *K-Popers* pada saat pemilu dilaksanakan.

Selain proses pemilu, terdapat aspek lain yang perlu diperhatikan dalam praktik demokrasi. Untuk memastikan adanya hubungan antara pemerintah dan masyarakat, keberadaan partai politik menjadi instrumen yang diperlukan agar demokrasi dapat berjalan dengan baik. Partai politik tentunya juga mewarnai keberjalanan demokrasi dalam suatu negara karena keberadaannya dapat dijadikan perantara masyarakat untuk berpartisipasi hal ini sejalan dengan penjelasan Haboddin (2016), yaitu “Pemilu dan partai politik merupakan satu kesatuan dalam sistem politik demokratis.” Peran partai politik sangat krusial karena kandidat yang mengikuti pemilihan umum selalu berasal dari salah satu partai politik yang beroperasi di Indonesia.

Setiap partai politik tentu saja ingin mendapatkan suara yang besar pada pemilihan umum sehingga umumnya partai politik akan meluncurkan strategi

politik demi mendapatkan suara tersebut dalam pemilu kedepannya. Strategi politik sendiri adalah sebuah rencana yang sistematis dan mengimplementasikannya dalam mencapai tujuan memenangkan dalam bidang politik. Dengan strategi politik inilah partai politik mampu memenangkan dalam setiap momentum perebutan kekuasaan (Basri, 2021).

Pada pesta demokrasi 2024 yaitu pemilu maka setiap partai politik mulai mempersiapkan diri dengan strategi politiknya masing-masing. Salah satu fenomena yang muncul adalah upaya pendekatan partai politik terhadap komunitas *K-Popers*. Kehadiran *K-Popers* sebagai kelompok yang aktif di media sosial serta partisipatif dalam berbagai isu sosial dan politik menjadikan mereka sebagai salah satu segmen masyarakat yang patut dipertimbangkan dalam strategi kampanye. Daya tarik musik *K-Pop* yang luas serta membuka peluang bagi partai politik untuk menjangkau pemilih muda melalui pendekatan yang berbasis pada budaya populer.

Gerindra merupakan salah satu partai politik yang turut mewarnai keberjalanan pemilu pada tahun 2024. Gerindra yang statusnya merupakan partai politik juga berusaha menjangkau masyarakat melalui media sosial termasuk memanfaatkan media sosial Twitter yang menjadi sarana Gerindra dalam melakukan komunikasi politik. Akun twitter milik Gerindra pun kini memiliki 742.212 dan terus aktif dalam melakukan publikasi aktivitas yang berkaitan dengan partai Gerindra.

Sebagai salah satu strategi dalam menarik perhatian kelompok pemilih terutama *K-Popers*, pada tanggal 8 Maret 2023, akun twitter milik partai

Gerindra (@Gerindra) membuat suatu postingan twitter dengan caption “Selamat pagi tweeps, salam #IndonesiaRaya untuk BLINK Indonesia” dimana postingan tersebut dimaksudkan untuk memberi tahu masyarakat luas khususnya BLINK yaitu sebutan untuk fans girlgroup asal Korea Selatan yang bernama BLACKPINK bahwa partai Gerindra mengadakan *Giveaway* tiket konser BLACKPINK yang akan diberikan secara gratis yang umumnya harus dibeli dengan kisaran harga Rp 1.400.000,00 – Rp 3.800.000,00.

Gambar 1. 3 Cuitan *Giveaway* Tiket Konser Blackpink Oleh Gerindra



Sumber: Akun X Gerindra (@Gerindra)

Salah satu ketentuan yang diberlakukan dalam kegiatan *Giveaway* tersebut adalah peserta diwajibkan berfoto di depan baliho atau billboard Prabowo sambil mengenakan atribut BLACKPINK sebagai syarat untuk mengikuti undian. Postingan tersebut kemudian mendapat respon dari warganet sejumlah 1,3 ribu komentar, 4,7 ribu kutipan twitter dan 1,8 ribu suka pada

postingan tersebut.

Pendekatan kepada kelompok *K-Popers* juga dilakukan oleh partai PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang melakukan hal sama dimana partai PSI pada tanggal 19 Februari, 25 Februari dan 4 Maret 2023 melakukan *Giveaway* tiket konser BLACKPINK dengan melakukan kuis di akun twitter partai PSI (@psi_id) yang saat ini memiliki 168.454 pengikut di twitter.

Gambar 1. 4 Cuitan *Giveaway* Tiket Konser Blackpink Oleh PSI



Sumber: Akun X PSI (@psi_id)

Melalui mekanisme kuis yang diselenggarakan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui akun media sosial Twitter (X) resminya, partai tersebut membagikan sebanyak tiga tiket konser BLACKPINK kepada peserta yang dinyatakan sebagai pemenang. Kuis ini dirancang dengan format interaktif yang mengharuskan peserta untuk mengikuti ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh PSI, seperti menjawab pertanyaan yang diumumkan melalui

unggahan resmi partai di media sosial X. Penentuan pemenang dilakukan secara langsung oleh pihak PSI, sehingga posisi partai tidak hanya sebagai fasilitator kegiatan, tetapi juga sebagai aktor utama yang mengendalikan proses seleksi dan distribusi hadiah.

Kegiatan-kegiatan tersebut tentu saja tak lain dan tak bukan dilakukan oleh partai politik untuk mendapatkan perhatian dari kelompok *K-Popers* yang kemudian terdapat kemungkinan adanya pengaruh pada perilaku memilih yang terbentuk. Perilaku memilih adalah tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang, partai politik ataupun isu publik tertentu (Oka, 2005). Penggemar *K-Pop* bukan hanya besar secara jumlah, tetapi juga memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan idol dan nilai-nilai komunitas mereka. Aktifnya mereka di media sosial serta solidaritas yang mereka bangun menciptakan ruang diskusi yang intens mengenai berbagai isu, termasuk politik. Reaksi mereka terhadap upaya partai politik dalam meraih suara melalui simbol *K-Pop* menunjukkan bahwa preferensi politik mereka tidak hanya ditentukan oleh faktor rasional seperti kebijakan partai, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial serta sejauh mana tindakan partai dianggap relevan atau bertentangan dengan nilai komunitas mereka. Strategi pendekatan kepada *K-Popers* dengan memanfaatkan media sosial ini juga membuktikan adanya pergeseran dari kampanye yang mulanya bersifat tradisional menuju cara yang lebih interaktif dengan menggabungkan hiburan dan politik. Namun, efektivitas strategi ini tetap bergantung pada respons yang diberikan oleh komunitas *K-Popers* itu sendiri, apakah mereka merasa tertarik atau justru menolak

keterkaitan budaya pop mereka dengan politik.

Fenomena keterlibatan partai politik dalam mengadopsi unsur *K-Pop* sebagai strategi pendekatan terhadap *K-Popers* menjadi aspek yang menarik untuk diteliti. Strategi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kelompok *K-Popers* memandang keterkaitan antara budaya *K-Pop* dan aktivitas politik, khususnya ketika partai politik menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam apakah pendekatan tersebut memiliki pengaruh terhadap perilaku memilih *K-Popers* pada Pemilu 2024 mengingat bahwa mayoritas anggota komunitas *K-Popers* berada dalam rentang usia pemilih yang memiliki hak suara maka penting untuk menganalisis sejauh mana strategi ini dapat membentuk preferensi politik mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas strategi politik berbasis budaya populer serta respons sosial yang muncul dalam komunitas *K-Popers* sebagai bagian dari dinamika politik di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh *Giveaway* tiket konser Blackpink yang dilakukan oleh Partai Gerindra dan PSI terhadap perilaku memilih *K-Popers* pada Pemilu tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh kegiatan *Giveaway* tiket konser Blackpink yang diselenggarakan oleh Partai Gerindra dan PSI memengaruhi perilaku memilih para *K-Popers* pada Pemilu 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti mampu meningkatkan kemampuan dalam berpikir secara kritis yang mana diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah. Penelitian ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk dapat melakukan penerapan atas ilmu yang telah didapatkan dan juga sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi peneliti terkait bagaimana perilaku memilih dalam kelompok *K-Popers*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pemikiran yang berhubungan dengan perilaku memilih kelompok *K-Popers* yang berkaitan juga dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh partai politik menjelang pemilu.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi partai politik dalam merancang strategi pendekatan politik yang lebih relevan. Temuan penelitian membantu partai memahami bahwa pendekatan terhadap kelompok pemilih tertentu perlu memperhatikan karakteristik sosial, preferensi budaya, serta nilai-nilai yang dipegang oleh kelompok tersebut agar tidak terjadi kesalahan strategi.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membawa kontribusi yang

positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda dan komunitas penggemar, agar lebih kritis dalam menyikapi kegiatan politik yang memanfaatkan unsur budaya populer.

1.5 Landasan Teori

Landasan berupa teori serta temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya sangat diperlukan karena dapat menjadi rujukan dalam menentukan teori yang paling relevan untuk digunakan dalam suatu penelitian. Dalam beberapa penelitian serupa terdapat teori-teori yang digunakan untuk menggali hasil penelitian. Penelitian serupa umumnya berfokus dalam domain partisipasi politik dan perilaku memilih yang mana menjadi teori sorotan untuk mengemas fenomena politik.

Teori partisipasi politik sendiri memberikan dasar agar dapat memahami betul bagaimana seorang individu dapat melibatkan dirinya dalam suatu kegiatan politik secara langsung maupun tidak sedangkan teori perilaku memilih mengupas tentang faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam keputusan pemilihan kandidat atau partai tertentu. Teori partisipasi politik dan perilaku memilih kemudian menjadi teori yang juga relevan dalam konteks penelitian yang berusaha penulis susun.

Dengan adanya teori – teori tersebut akan memberikan pemahaman dan proses eksplorasi lebih lanjut mengenai analisis untuk mengetahui sejauh mana aktivitas berunsur *K-Pop* yang dilakukan oleh partai politik dapat mempengaruhi keputusan partisipasi politik para *K-Poppers* pemilu nantinya.

Melengkapi teori - teori tersebut maka dihadirkan pula teori strategi politik yang akan menjelaskan mengenai proses pendekatan yang dilakukan demi mempertahankan kekuasaan politik.

1.5.1 Strategi Politik

Strategi politik dapat dipahami sebagai pendekatan yang mencakup proses perencanaan, penerapan, dan pengelolaan langkah-langkah dalam kurun waktu tertentu. Dalam pelaksanaan strategi yang efektif, diperlukan koordinasi antaraktornya, penentuan tema politik yang konsisten, pemetaan faktor pendukung berdasarkan pertimbangan rasional, pengelolaan sumber daya dan pendanaan yang efisien, serta pemanfaatan taktik kampanye untuk mencapai tujuan elektoral. Dalam konteks politik, para peserta pemilu perlu mengembangkan strategi untuk meraih kemenangan, dengan melakukan analisis untuk mengidentifikasi dukungan, massa mengambang, dan pendukung peserta lainnya. Strategi politik umumnya digunakan sebagai upaya untuk memenangkan atau mempertahankan kekuasaan, terutama pada masa penyelenggaraan pemilu. Penerapannya berkaitan erat dengan perencanaan kampanye yang diarahkan untuk mengumpulkan dukungan pemilih sebanyak mungkin, sehingga aktor politik memperoleh otoritas dan pengaruh yang diperlukan dalam mendorong agenda serta kebijakan yang dianggap mampu membawa perubahan bagi masyarakat.

Strategi politik merupakan suatu rencana terorganisir yang

diimplementasikan untuk mencapai tujuan dan meraih kemenangan dalam arena politik. Baihaqi (2022) menganggap strategi sebagai alat dan metode untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, dengan strategi politik diartikan sebagai sarana politik untuk meraih kemenangan, posisi jabatan, atau kekuasaan. Oleh karena itu, strategi politik dianggap sebagai instrumen politik yang dapat digunakan untuk meraih berbagai hal. Dengan menerapkan strategi politik yang baik dan tepat, baik kandidat maupun partai politik dapat berhasil meraih kemenangan dalam setiap momen persaingan politik. Oleh karena itu, peserta pemilihan umum, baik itu individu maupun partai politik, diharapkan untuk mempersiapkan strategi politik secara optimal.

Penentuan strategi dalam kegiatan kampanye politik merupakan tahapan yang sangat penting dan harus dilakukan secara cermat. Kekeliruan dalam merancang strategi dapat menimbulkan konsekuensi besar, seperti pemborosan waktu, biaya, dan energi. Kampanye pemilihan pada dasarnya bertujuan mengantarkan kandidat yang diusung tim kampanye untuk memenangkan jabatan tersebut melalui pemilihan langsung oleh masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, penerapan strategi komunikasi politik memegang peran yang sangat menentukan.

Menurut Hafied Cangara (2015), terdapat empat jenis strategi komunikasi dalam kampanye politik. Sebagai pelaku utama komunikasi, seorang juru kampanye harus memiliki keterampilan komunikasi, ide

kreatif, dan kecerdasan. Dalam studi komunikasi, masyarakat yang menjadi target kampanye disebut khalayak. Memahami target sasaran ini penting karena kesuksesan kampanye bergantung pada dukungan mereka. Pentingnya menyusun pesan yang tepat dan efektif melibatkan pemahaman yang baik terhadap struktur pesan, argumentasi logis, kemampuan berbicara dengan baik, dan kemampuan menggunakan humor. Pesan kampanye dapat berbentuk informatif, persuasif, atau propaganda.

Dari kedua tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi politik dan kampanye politik merupakan aspek yang sangat penting dalam dunia politik. Strategi politik dianggap sebagai alat untuk meraih kemenangan dan kekuasaan, sementara kampanye politik membutuhkan strategi komunikasi yang efektif untuk memenangkan dukungan dari masyarakat. Kesalahan dalam penetapan strategi dapat memiliki konsekuensi serius, sehingga perencanaan dan eksekusi strategi menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan politik.

1.5.2 Partisipasi Politik

Partisipasi politik menggambarkan keterlibatan warga, baik sebagai individu maupun kelompok, dalam aktivitas politik atau dalam proses penentuan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Bentuk partisipasi tersebut dapat beragam, mulai dari keterlibatan langsung dalam pemilu hingga partisipasi tidak langsung seperti mengikuti aksi

demonstrasi, kegiatan kampanye, maupun upaya advokasi.

Partisipasi politik dapat didefinisikan dengan berbagai cara menurut berbagai pandangan ahli. Menurut As'ari (2006), partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum untuk menentukan pemimpin pemerintahan. Surbakti (2010) mendefinisikan partisipasi politik sebagai keterlibatan warga negara biasa, tanpa memiliki kewenangan, dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Syafiie (2003) menjelaskan partisipasi politik rakyat sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Miriam Budiardjo (2008) mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan individu atau kelompok untuk aktif terlibat dalam kehidupan politik, termasuk dalam pemilihan pemimpin negara dan mempengaruhi kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan dalam konteks kegiatan politik yang mana dalam hal ini warga secara aktif ikut serta dalam proses kegiatan – kegiatan politik. Masyarakat dapat melakukan partisipasi politik dengan berbagai bentuk seperti dengan terlibat dalam pemilihan umum, menjadi anggota sebuah partai politik atau bahkan ikut berpartisipasi langsung saat kampanye politik dilaksanakan. Milbrath mendefinisikan bahwa terdapat empat alasan bervariasi partisipasi politik seseorang. Pertama sejauh mana orang menerima perangsang politik.

Kedua karakteristik pribadi seseorang. Ketiga karakteristik sosial seseorang dan keempat ialah keadaan politik atau lingkungan politik tempat seseorang dapat menemukan dirinya sendiri (Sastroatmodjo, dalam Nugraheni: 2016).

Tingkat partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat tentu saja akan menunjukkan apakah masyarakat dalam suatu negara sadar dan memahami betul fenomena – fenomena politik yang terjadi di negara tersebut dan turut serta mempunyai keinginan untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan politik yang sedang terjadi. Menurut Miaz (2012: 31) jika tingkat partisipasi politik masyarakat rendah, maka ada indikasi bahwa pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan di suatu negara memberi tanda yang kurang baik. Perlu dipahami bahwa partisipasi politik yang ada dalam suatu negara menjadi hal yang penting karena hal ini menjadi sebuah indikator kesehatan demokrasi yang terjadi di negara tersebut.

Merujuk pada pendapat para ahli yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik merupakan keterlibatan warga, baik secara individu maupun kelompok, dalam aktivitas politik serta dalam proses penentuan kebijakan di tingkat pemerintahan. Partisipasi politik mencakup berbagai bentuk keterlibatan dalam kehidupan politik, mulai dari pemilihan umum hingga berbagai bentuk advokasi dan demonstrasi. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan keragaman cara individu atau kelompok berkontribusi dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, partisipasi politik tidak

hanya terbatas pada proses formal seperti pemilihan, tetapi juga melibatkan berbagai aktivitas yang bertujuan untuk memengaruhi arah kebijakan pemerintah. Dengan demikian, partisipasi politik memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan negara.

1.5.3 Perilaku Memilih

Perilaku memilih, atau *voting behavior*, menggambarkan tindakan individu dalam menetapkan pilihan politik yang menurutnya paling sesuai atau paling disukai. Labolo (2000) mendefinisikan *voting* sebagai kegiatan warga negara yang memiliki hak memilih, terdaftar sebagai pemilih, dan memberikan suaranya untuk memilih atau menentukan wakil-wakilnya. Lanjutnya, perilaku memilih merupakan suatu studi yang fokus pada kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan tersebut.

Perilaku memilih dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam menentukan pilihan terhadap kandidat, partai politik, atau isu tertentu pada saat pemilihan umum. Perilaku ini mencakup beragam aspek yang meliputi pertimbangan sosial, psikologis, dan rasional yang memengaruhi bagaimana seseorang membentuk preferensi politiknya. Perilaku memilih juga mencerminkan dinamika preferensi, keyakinan,

nilai, serta informasi yang diterima pemilih mengenai kontestan politik dan program yang ditawarkan.

Terdapat tiga pendekatan mengenai perilaku memilih. Pertama, terdapat pendekatan sosiologis yang diperkenalkan oleh Columbia University Bureau of Applied Social Science. Kedua, ada pendekatan psikologis yang dikembangkan oleh University of Michigan Survey Research Center. Ketiga, pendekatan rasional dimana pendekatan rational choice, yang menentukan dalam sebuah pemilu bukanlah adanya ketergantungan terhadap ikatan sosial struktural atau ikatan partai yang kuat, melainkan hasil penilaian rasional dari warga yang cakap (Syafhendry, 2016).

Berdasarkan uraian para ahli sebelumnya, teori perilaku memilih dapat dipahami sebagai bidang kajian yang berfokus pada pola kebiasaan dan kecenderungan pilihan masyarakat dalam kontestasi elektoral. Dalam kajian tersebut, terdapat tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional. Pendekatan sosiologis yang dipelopori oleh Columbia University Bureau of Applied Social Science menjelaskan perilaku memilih melalui pengaruh faktor sosial dan struktur lingkungan pemilih. Sebaliknya, pendekatan psikologis yang dikembangkan oleh University of Michigan Survey Research Center mengarahkan perhatian pada aspek psikologis dan motivasi internal sebagai penentu preferensi politik seseorang. Adapun pendekatan rasional menilai keputusan memilih sebagai hasil pertimbangan untung

dan rugi. Secara umum, perilaku memilih dapat dimaknai sebagai bentuk keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses politik, yang dapat diwujudkan melalui aktivitas seperti memberikan suara pada pemilu, mengikuti kampanye atau rapat umum, melakukan interaksi dengan pejabat publik, dan sebagainya. Serangkaian tindakan ini mencerminkan proses pengambilan keputusan politik yang mana bersamaan dengan terbentuknya perilaku seseorang dalam menentukan pilihannya. Oleh karena itu, teori perilaku memilih memberikan wawasan mendalam tentang dinamika kompleks yang memengaruhi keputusan pemilih dalam konteks demokrasi.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Perilaku memilih yang muncul di kalangan *K-Popers* sebagai respons terhadap aktivitas bernuansa *K-Pop* yang dilakukan oleh Partai Gerindra dan PSI dianalisis menggunakan teori perilaku memilih dengan mengacu pada tiga pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional.

Tabel 1. 1 Kerangka Konseptual

Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator
Kegiatan <i>Giveaway</i> Tiket Konser oleh Gerindra dan PSI	Keterlibatan pemilih yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengaruh antara strategi politik berbasis <i>K-Pop</i> dengan respons pemilih dalam kelompok <i>K-Popers</i> .	1. Pemahaman Bentuk Kegiatan 2. Eksposur terhadap kegiatan 3. Persepsi terhadap kegiatan 4. Relevansi dengan identitas

Perilaku Memilih <i>K-Popers</i> Pada Pemilu 2024	Sosiologis, menempatkan kegiatan memilih yang kemudian dikaitkan dengan konteks sosial.	1. Pengaruh lingkungan sosial 2. Aktivitas dalam komunitas 3. Media sosial
	Psikologis, memilih menentukan yang dipilih saat pemilu berdasarkan kondisi psikologis yang ada dalam dirinya.	1. Ikatan emosional pada partai 2. Persepsi terhadap partai 3. Loyalitas politik
	Rasional, memilih menentukan pilihannya berdasarkan pemikiran mengenai keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan.	1. Evaluasi program partai 2. Pertimbangan manfaat pribadi 3. Reaksi terhadap kegiatan partai

1.6.1 Perumusan Hipotesis

- Ho1 : Tidak terdapat pengaruh dari faktor-faktor sosiologis pada perilaku memilih *K-Popers* terhadap kegiatan *Giveaway* tiket konser BLACKPINK oleh Gerindra dan PSI.
- Ha1 : Terdapat pengaruh dari faktor-faktor sosiologis pada perilaku memilih *K-Popers* terhadap kegiatan *Giveaway* tiket konser BLACKPINK oleh Gerindra dan PSI.
- Ho2 : Tidak terdapat pengaruh dari faktor-faktor psikologis pada perilaku memilih *K-Popers* terhadap kegiatan *Giveaway* tiket konser BLACKPINK oleh Gerindra dan PSI.
- Ha2 : Terdapat pengaruh dari faktor-faktor psikologis pada perilaku memilih *K-Popers* terhadap kegiatan *Giveaway* tiket konser BLACKPINK oleh Gerindra dan PSI.

- Ho3 : Tidak terdapat pengaruh dari faktor-faktor rasional pada perilaku memilih *K-Popers* terhadap kegiatan *Giveaway* tiket konser BLACKPINK oleh Gerindra dan PSI.
- Ha3 : Terdapat pengaruh dari faktor-faktor rasional pada perilaku memilih *K-Popers* terhadap kegiatan *Giveaway* tiket konser BLACKPINK oleh Gerindra dan PSI.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian Kuantitatif, merupakan penelitian yang membutuhkan data dalam bentuk angka-angka atau nilai, atau data dalam bentuk informasi, komentar, pendapat atau kalimat namun dikuantitatifkan (Mundir, 2013). Penulis berusaha untuk menguji hubungan kegiatan berunsur *K-Pop* yang dilakukan oleh partai politik terhadap perilaku memilih yang terbentuk

1.7.2 Populasi

Populasi adalah kumpulan unit yang akan diteliti ciri – ciri (karakteristik)nya, dan apabila populasinya terlalu luas, maka peneliti harus mengambil sampel (bagian dari populasi) itu untuk diteliti (Abdullah, 2015). Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah individu yang mengidentifikasikan diri sebagai *K-Popers*. Populasi penelitian tidak dimaknai sebagai seluruh penggemar *K-Pop* di Indonesia

secara umum, melainkan dibatasi secara operasional melalui kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan konteks penelitian. Populasi difokuskan pada *K-Popers* yang berada dalam lingkup sosial dan informasi yang relevan dengan objek penelitian, sehingga mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan variabel yang diteliti. Untuk menentukan jumlah sampel, penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (*margin of error*) sebesar 10 persen. Berdasarkan perhitungan tersebut, jumlah populasi penelitian ditetapkan secara operasional sebanyak 1.000 individu *K-Popers*.

1.7.3 Sampel

Sampel sendiri didefinisikan sebagai bagian dari sebuah populasi yang mana akan menjadi target pengambil data saat penelitian. Keberadaan sampel menjadi hal yang penting karena sampel merupakan representatif dari populasi penelitian dan dikarenakan keterbatasan peneliti maka diperlukan penentuan sampel yang akurat untuk mewakili sebuah populasi.

Dalam penelitian ini untuk menentukan sampel maka digunakan *non-probability sampling* dengan pendekatan teknik sampel purposif (*purposive sampling*) yang akan memilih sampel penelitian berdasarkan kriteria tertentu untuk mencapai hasil penelitian. Pada konteks ini, sampel yang akan digunakan merupakan individu yang mengidentifikasikan dirinya sebagai *K-Popers*, memenuhi kriteria usia

17 tahun ke atas, menggunakan platform media sosial X dan mengetahui atau pernah terpapar informasi mengenai kegiatan *giveaway* tiket konser BLACKPINK yang dilakukan oleh Partai Gerindra dan PSI. Kriteria ini dipilih sebab kelompok usia 17 tahun ke atas telah memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, sehingga relevan dengan penelitian yang berfokus pada perilaku memilih.

Adapun besaran jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini akan ditentukan dengan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Di mana:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat Kesalahan (*margin of error*) 10%

Pada akhirnya ditemukan jumlah sampel yang akan digunakan untuk penelitian ini sejumlah 100 responden.

1.7.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu tau perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner (Abdullah, 2015). Sehubungan dengan

penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui metode kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya kepada responden, kemudian responden diminta untuk memberikan jawaban sesuai dengan kondisi atau pandangan mereka.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber eksternal, seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, ataupun artikel resmi, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses pengumpulannya. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan berbagai literatur ilmiah meliputi artikel, data dari situs resmi, serta sumber penunjang lain seperti jurnal dan skripsi yang relevan dengan topik penelitian.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian maka kuesioner dijadikan instrumen penelitian yang digunakan oleh penulis. Kuesioner berisi sejumlah pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya dan diberikan kepada responden untuk dijawab. Penelitian ini akan memberikan kuesioner kepada *K-Popers* yang sesuai dengan karakteristik sampel yang sudah

ditentukan yang mana dengan adanya kuesioner ini bertujuan untuk mendapat jawaban langsung dari responden atas kuisisioner yang telah diberikan.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini akan berfokus untuk menganalisis materi – materi tertulis, visual atau bahkan elektronik yang sejalan dengan kegiatan politik dan ekspresi politik yang dilakukan oleh *K-Popers* di Indonesia. Sumber yang digunakan dipastikan merupakan sumber resmi.

1.7.6 Teknik Pengolahan Data

Dalam rangka mencapai hasil penelitian yang dituju maka diperlukan analisis data yang akan mengolah data sehingga menghasilkan penjelasan dari data yang telah dikumpulkan. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. *Editing*

Tahap ini merupakan proses awal dalam pengolahan data yang bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan jawaban dari responden. Pada tahap ini, peneliti akan meninjau kembali setiap lembar kuisisioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan pengisian data oleh responden.

2. *Coding*

Merupakan kegiatan pemberian kode numerik pada setiap kategori jawaban dalam kuisioner agar data dapat dengan mudah diinput dan diolah menggunakan perangkat lunak statistik.

3. Tabulasi Data

Tabulasi data merupakan tahap akhir dalam proses pengolahan data awal, di mana data yang telah diberi kode disusun ke dalam bentuk tabel agar dapat dianalisis secara lebih mudah sehingga akan menemukan hasil akhir dari penelitian. Tabulasi data ini akan dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak pengolahan data.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai variabel yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan perhitungan guna menguji hipotesis yang telah dirumuskan serta dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Packages for the Social Sciences* (SPSS).

1.7.7.1 Uji Validitas

Sebelum data dianalisis, setiap butir pertanyaan dalam kuesioner perlu dievaluasi validitasnya. Yang dimaksud validitas adalah untuk menyatakan sejauhmana data yang didapatkan melalui instrumen penelitian (dalam hal ini kuesioner) akan mengukur apa yang ingin diukur (Abdullah, 2015). Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa setiap item pertanyaan benar-benar mampu mengukur variabel yang dimaksud dalam penelitian. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur sesuai dengan tujuan pengukurannya. Validitas ditentukan melalui nilai r , dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, maka item pertanyaan dinyatakan valid.
- Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$, maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid.
- Nilai $r \text{ tabel}$ diperoleh dengan rumus derajat kebebasan (df) = $n - 2$ dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05.

1.7.7.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat kestabilan dan konsistensi jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mewakili dimensi suatu variabel dalam instrumen kuesioner. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan nilai koefisien Cronbach's Alpha, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika nilai alpha Cronbach $> 0,60$ maka instrumen reliabel
- Jika nilai alpha Cronbach $< 0,60$ maka instrumen tidak reliabel

1.7.7.3 Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan nilai variabel X terhadap variabel Y secara kuantitatif. Model regresinya dinyatakan melalui persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen

a = konstanta

x = Variabel independent

Uji regresi linier sederhana dilakukan setelah melakukan 2 uji yaitu uji normalitas dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Asumsi normalitas merupakan langkah awal dalam analisis regresi yang digunakan untuk menilai apakah sisa hasil prediksi (residual) memiliki sebaran data yang mengikuti pola distribusi normal. Untuk mengevaluasi hal tersebut, digunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Interpretasi hasilnya didasarkan pada nilai signifikansi (Sig) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika nilai Sig lebih besar dari 0,05 (5%), maka dapat

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

- Jika nilai Sig kurang dari 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Asumsi heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan variasi residual dari satu titik pengamatan ke titik lainnya. Untuk mendeteksinya, digunakan uji Glejser.

Berikut merupakan ketentuan yang digunakan:

- Dianggap tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05.
- Dianggap mengandung heteroskedastisitas apabila signifikansinya kurang dari 0,05.

1.7.7.4 Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Uji hipotesis parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Y). Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi (Sig.) pada tabel hasil regresi dengan ketentuan berikut:

- Jika nilai Sig. $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
Artinya variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).
- Jika nilai Sig. $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
Artinya variabel independen (X) tidak berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen (Y).

1.7.7.5 Uji Korelasi dan Determinasi

Koefisien determinasi (R Square) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R Square berada pada rentang 0–1, di mana semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel X semakin kuat dalam menerangkan variasi perubahan pada variabel Y. Sebaliknya, semakin mendekati 0 berarti kemampuan variabel X dalam menjelaskan Y semakin lemah.